

Satu Data Indonesia sebagai Pijakan Transformasi Susun Kebijakan

Hari Dwi Korianto

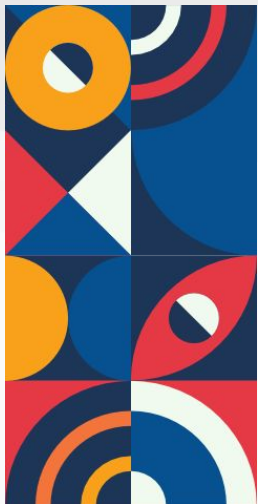
Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat,
Direktur Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/ Bappenas



18 – Oktober 2022

ditayangkan pada:

Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Tahun 2022

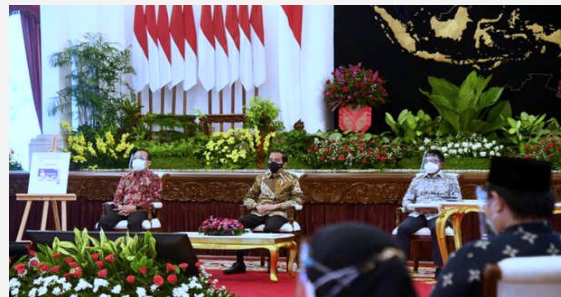


Pengantar Satu Data Indonesia

5 Arahan Presiden Perencanaan Transformasi Digital



- 1 **Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital** yang diikuti **percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa** atau kelurahan dan titik-titik layanan publik.
- 2 **Roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis** seperti: pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, dan sektor penyiaran
- 3 Percepatan **integrasi Pusat Data Nasional**
- 4 Mempersiapkan kebutuhan **SDM (sumber daya manusia) talenta digital**
- 5 Mempersiapkan dengan cepat **regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital**



"Data adalah jenis kekayaan baru Bangsa Kita"

**Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia**

Sumber: Pidato kenegaraan di DPR (16 Agustus 2019)



Indonesia Emas 2045

Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur



Mendukung Visi

Transformasi Digital Nasional



Tata Kelola
Pemerintahan yang
Baik (SPBE)



Data Pemerintah
Berkualitas dan
Terintegrasi (SDI)

Kebijakan SPBE dan SDI berjalan beriringan
dan saling mendukung

Mewujudkan

Birokrasi Efisien dan Akuntabel

Layanan Pemerintah Berkualitas dan Mudah
Diakses

Pembangunan Nasional Adaptif dan Tepat
Sasaran



Percepatan Pemulihan Ekonomi,
Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri, SDGs, dan
Perlindungan Sosial



Kebermanfaatan SDI untuk Proses Pembangunan Wilayah

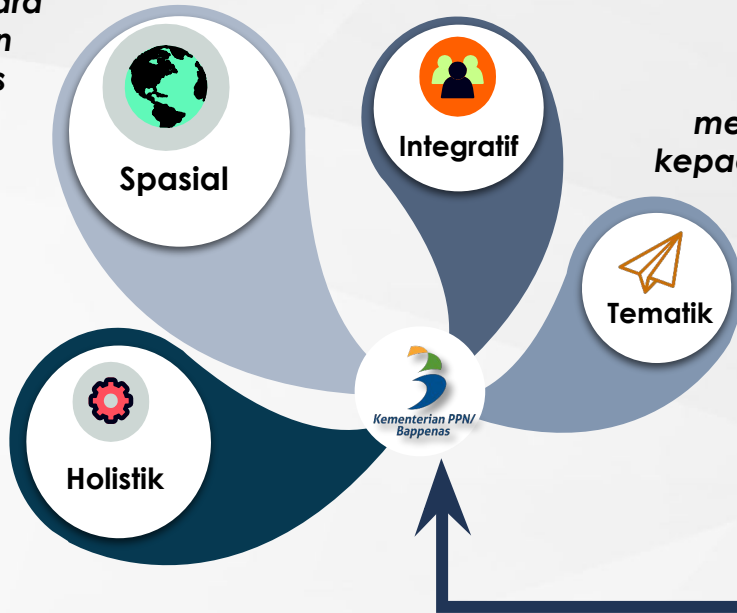
Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial

kebutuhan relasi antara informasi lokasi dan fungsi dari aktivitas pembangunan

integrasi fungsi dan pengalokasian sumberdaya

mengarahkan kepada kebutuhan nasional

pendekatan komprehensif (upstream to downstream)



PP 17 TAHUN 2017
tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan
Penganggaran



Data dan Peta
"Big Data Analytics dan
Artificial Intelligence"

**"Money Follow Program,
Program Follow Data"**

Perpres 39/2019 Pasal 4 :
"Konsep data merupakan ide
yang mendasari Data dan
tujuan Data tersebut
diproduksi"



2021

- Pembentukan Pokja Forum SDI melalui Kepmen PPN
- Penyepakatan tema data Prioritas & Identifikasi Ketersediaan Data dan informasi
- Rapat Dewan Pengarah 2021: Percepatan SDI
- Asesmen massal SDI untuk K/L & Provinsi
- Pengembangan Platform Portal SDI
- Standar Data & Metadata:
 - Perban BPS 4/2021 (Standar Data Statistik Nasional)
 - SE Kepala BIG 6/2021 (Pedoman Standar Data & Metadata Spasial)
 - Pedoman Keuangan yang mengacu pada IFMIS

2019

- Inisiasi Regulasi Kelembagaan & Tata Kerja Dewan Pengarah dan Forum
- Sosialisasi dan Asistensi awal K/L

2020

- **Penerbitan Regulasi:**
 - Permen PPN 16/2020 (Manajemen Data SPBE)
 - Permen PPN 17/2020 (Pengelolaan Portal SDI)
 - Permen PPN 18/2020 (Tata Kerja Penyelenggara SDI)
- **Standar Data & Metadata:**
 - Perban BPS 4/2020 (Juknis Standar Data Statistik)
 - Perban BPS 5/2020 (Juknis Metadata Statistik)
 - Pedoman Keuangan yang mengacu pada IFMIS
- **Rapat Dewan Pengarah 2020:** Penyiapan Fondasi Kebijakan

Target 2022

Grand Launching Portal SDI pada Nov 2022

Jan-Jul 2022

- Soft Launching Portal SDI
- Penyepakatan Data Prioritas tahun 2022
- Penyepakatan Renaksi SDI tahun 2022-2024
- Rapat Dewan Pengarah 2022: Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia 2022



Rapat Dewan Pengarah Tahun 2022

Poin Kesepakatan



Rapat Dewan Pengarah: Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

1

Penguatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI)

2

Penguatan **Kolaborasi Implementasi** Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat Pusat dan Daerah

3

Peningkatan **Pemanfaatan Infrastruktur TIK** Nasional untuk berbagipakai data

4

Peningkatan **Pemanfaatan Data** untuk **Pengambilan Keputusan** dan **Perumusan Kebijakan**.

5

Mendukung **Registrasi Sosial Ekonomi** bersinergi dengan **Satu Data Indonesia**

6

Peningkatan Peran Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung Penyelenggaraan SDI di Pemerintahan Daerah dan **penetapan NIK sebagai Data Induk** (Master Data) guna pemanfaatan data layanan administrasi pemerintah

7

Penyusunan dan **Implementasi Strategi Baru** untuk **Pemenuhan SDM Talenta Digital** di pemerintahan (*data leadership* dan *digital leadership*).

Data-Driven Policy Making

Big Data
Analysis



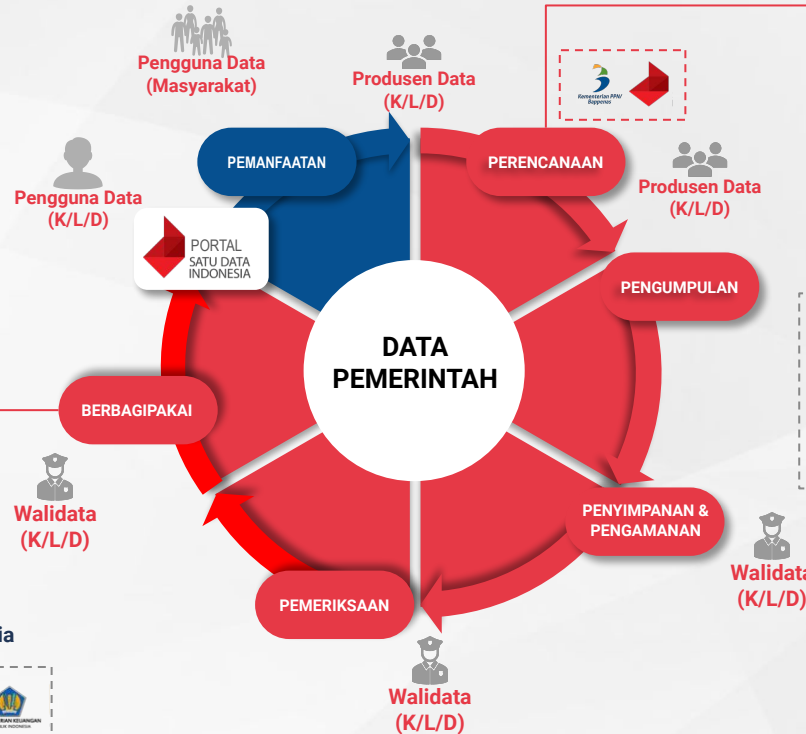
Modelling



Artificial
Intelligent



Viz/Dashboard



- Daftar Data
- Daftar Data Prioritas
- Rencana Strategis
- Rencana Aksi
- Rencana Penganggaran
- Arsitektur Data
- Standar Data
- Metadata baku
- Peraturan Menteri tentang Data Prioritas

Prinsip Satu Data

Standar Data



Kode Referensi



Metadata



Interop



Portal Satu
Data Indonesia





ELEMEN PENDUKUNG

Kelembagaan

Data Prioritas
(Fundamental Dataset)

Inovasi

Regulasi

Rencana Aksi

Pemanfaatan

Penganggaran

Teknologi

Data Leadership

SDM

Pemberdayaan

Penyelenggaraan

PRINSIP SATU DATA

Satu Standar Data

Satu Metadata Baku

Interoperabilitas

Kode Referensi/Data Induk

SDI dan SPBE



Data dalam Transformasi Digital sebagai Gerakan Nasional

Visi: Menjadi Negara Terdepan yang digerakkan oleh Ekonomi Digital yang Dinamis dengan Talenta Berkualitas Tinggi dan Pembangunan Inklusif untuk Semua

Ekosistem Digital	Layanan Digital Sektor Strategis
<ul style="list-style-type: none"> Peraturan, Kebijakan & Kelembagaan Infrastruktur dan Konektivitas Sumberdaya Manusia Platform Data dan Pemberdayaan Pendanaan & Insentif 	<ul style="list-style-type: none"> e-Commerce (termasuk UMKM) e-Education, e-Health Fintech, Industry 4.0, Digital Tourism & Travel Smart Cities e-Government

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE (e-Government)	
<ul style="list-style-type: none"> Proses Bisnis Aplikasi (e-Planning, e-Budgeting, e-Proc, e-Payment, e-Services, etc) Data dan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> Data Center Jaringan (Konektivitas) □ Last mile Keamanan

SATU DATA INDONESIA



DATA STATISTIK



DATA GEOSPASIAL



DATA KEUANGAN NEGARA



DATA LAINNYA (BIG DATA)

Perencanaan Berbasis Bukti



Analisa Sosial

Analisa Ekonomi

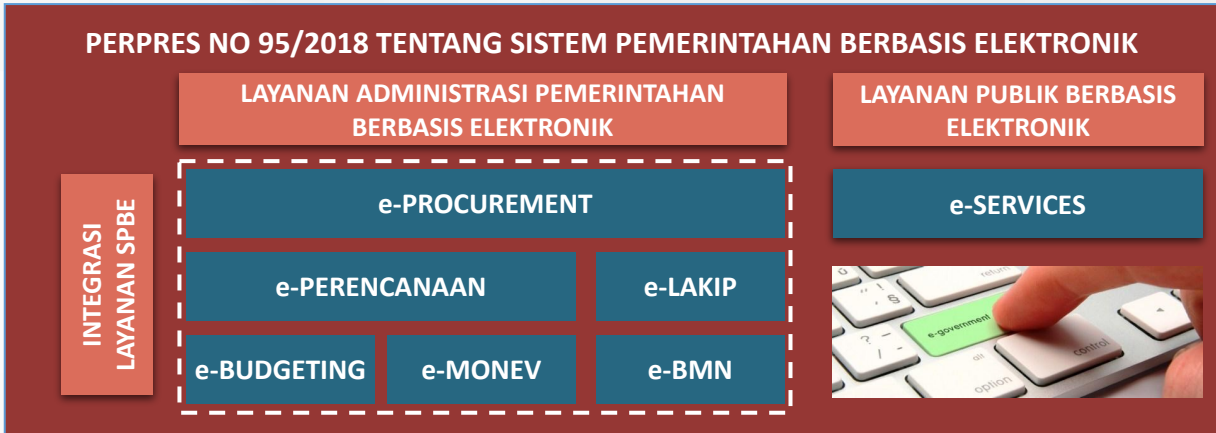
Analisa Spasial

dan Sektor Lain



HUBUNGAN SDI DENGAN SPBE

Permen PPN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data, Pasal 2,
“Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat merupakan bagian dari penyelenggaraan Manajemen Data SPBE.”

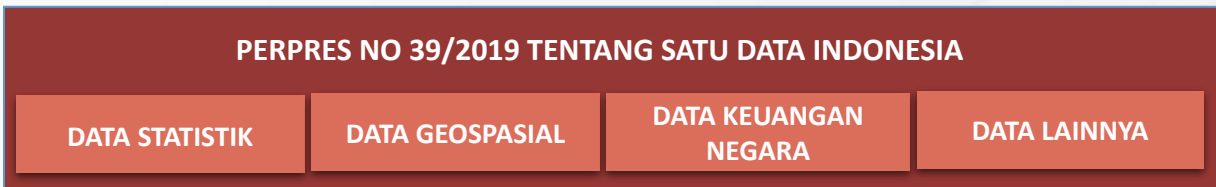


TUJUAN MANAJEMEN DATA SPBE

Menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

TUJUAN PENYELENGGARAAN SDI



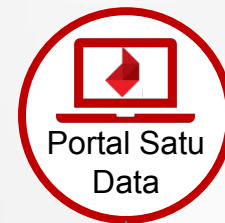
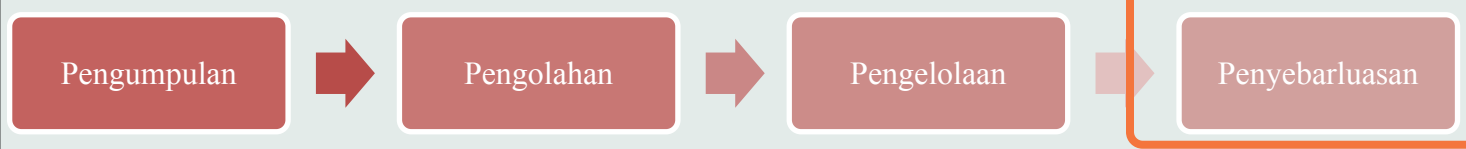
Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta



Penyelenggaraan Satu Data Indonesia



Penyelenggaraan Informasi Geospasial (JIGN)



Perencanaan Data

Standar data, struktur & format Metadata Spasial mengacu pada ketetapan oleh BIG selaku Pembina Data Spasial

Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data spasial termasuk integrasi IGT (Informasi Geospasial Tertentu) dengan IGD (Informasi Geospasial Dasar, serta sinkronisasi antara data spasial

Penyebarluasan Data

Penyebarluasan data spasial (selain melalui InaGeoPortal) melalui layanan interoperabilitas Data yang akan diintegrasikan dengan Portal Satu Data



Inisiatif Smart City Yang Sedang Berjalan

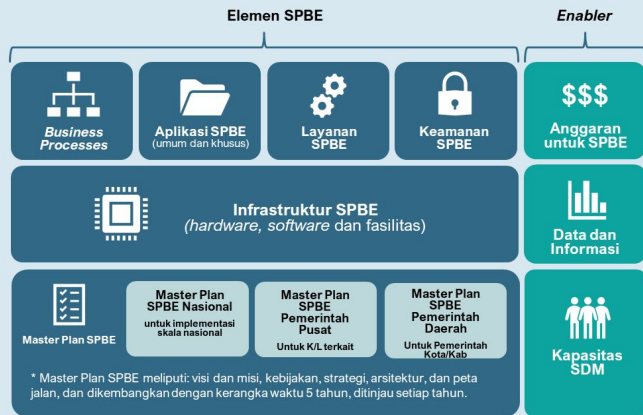
Beralih Ke Pemerintahan Digital (E-Government) dan Bangsa Cerdas (Smart Nation)



Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong semua lembaga publik untuk mendigitalkan layanan publik dan beralih ke tata kelola berbasis elektronik untuk meningkatkan layanan publik dan meningkatkan efisiensi proses bisnis.

Elemen SPBE



Satu Data Indonesia (SDI)

Perpres No.39/2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) mendorong penerapan satu data dengan tujuan: (1) memberikan acuan pelaksanaan tata kelola data pemerintah; (2) mewujudkan ketersediaan data pemerintah; (3) mendorong keterbukaan dan transparansi data; serta (4) mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan

Prinsip Satu Data Indonesia

Satu Standar Data



Satu Raw Metadata



Interoperabilitas



Satu Kode Referensi dan Sumber Data

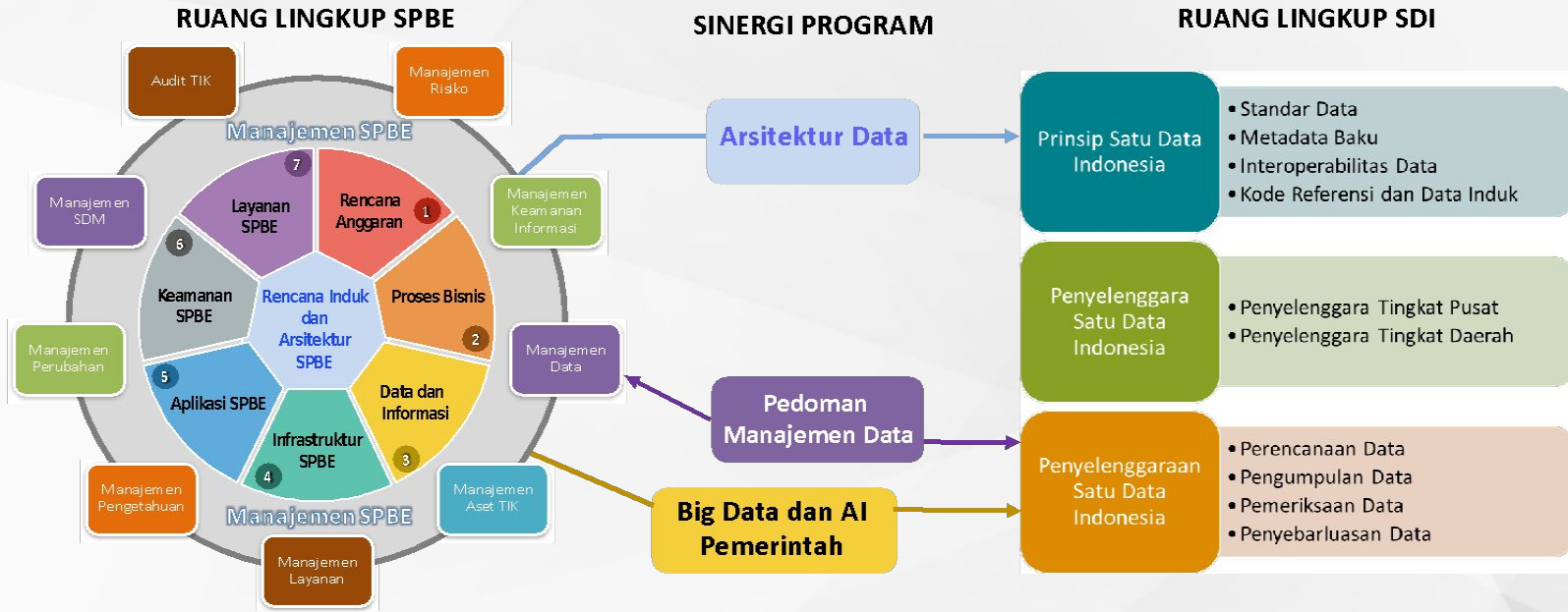


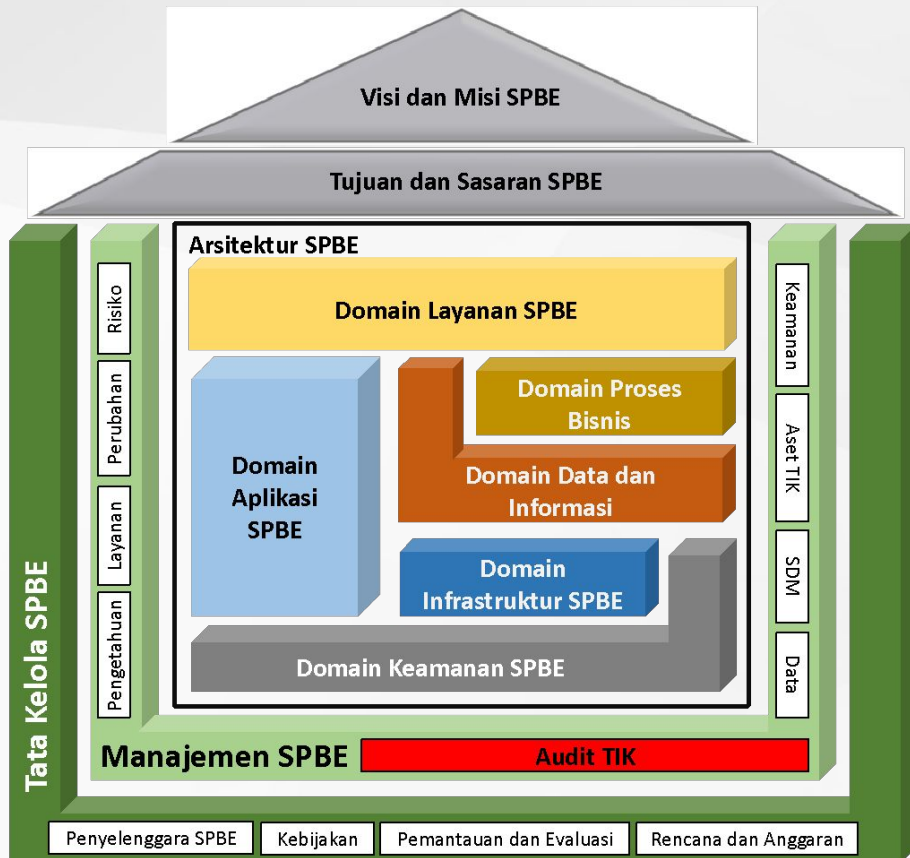
data.go.id





Sinergi SDI dan SPBE





PRINSIP

- Efektivitas
- Keterpaduan**
- Kesinambungan
- Efisiensi
- Akuntabilitas
- Interoperabilitas
- Keamanan



MANFAAT



Menghilangkan tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan



Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, serta memperkuat Keamanan Informasi



Menerapkan standarisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan digital Nasional (*Service Level Agreement*)



Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia



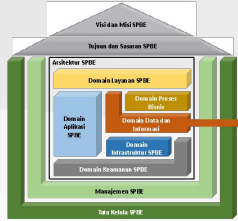
Memudahkan integrasi layanan pemerintah, sehingga menumbuhkan-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru



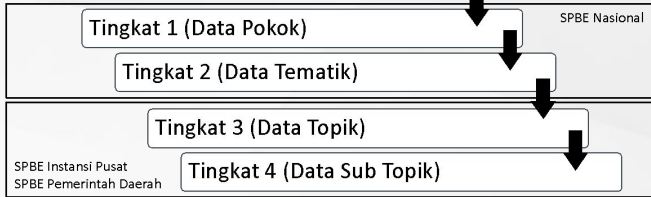
Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE



Taksonomi Data di SPBE



Struktur Arsitektur Data dan Informasi



Struktur Referensi

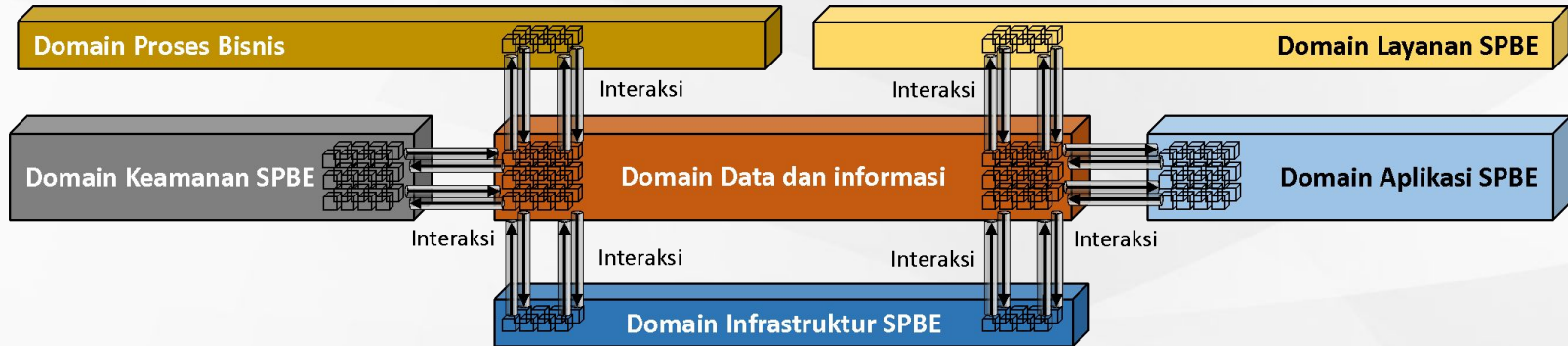
Taksonomi Referensi

Tingkat 1 (Data Pokok)	Tingkat 2 (Data Tematik)
RAD.01 Informasi Pertahanan dan Luar Negeri	↔ RAD.01.01 Data pertahanan
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	↔ RAD.01.02 Data urusan luar negeri
	↔ RAD.02.01 Data industri
	↔ RAD.02.02 Data perdagangan
	↔ RAD.02.03 Data pertanian
	↔ RAD.02.04 Data perkebunan
	↔ RAD.02.05 Data peternakan
	↔ RAD.02.06 Data perikanan
	↔ RAD.02.07 Data badan usaha milik negara
	↔ RAD.02.08 Data investasi
	↔ RAD.02.09 Data koperasi
	↔ RAD.02.10 Data usaha kecil dan menengah
	↔ RAD.02.11 Data pariwisata
RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	↔ RAD.03.01 Data pekerjaan umum
	↔ RAD.03.02 Data transmigrasi
	↔ RAD.03.03 Data transportasi
	↔ RAD.03.04 Data perumahan
	↔ RAD.03.05 Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
	↔ RAD.03.06 Data pertahanan
	↔ RAD.03.07 Data kependudukan
RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	↔ RAD.04.01 Data kesehatan
	↔ RAD.04.02 Data sosial
	↔ RAD.04.03 Data pemberdayaan perempuan
RAD.05 Informasi Ketenabatan Umum dan Keselamatan	↔ RAD.05.01 Data hukum
	↔ RAD.05.02 Data keamanan
	↔ RAD.05.03 Data hak asasi manusia
RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	↔ RAD.06.01 Data pendidikan
	↔ RAD.06.02 Data ketenagakerjaan
	↔ RAD.06.03 Data ilmu pengetahuan dan teknologi
	↔ RAD.06.04 Data pemuda
	↔ RAD.06.05 Data olahraga
RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	↔ RAD.07.01 Data pertambangan
	↔ RAD.07.02 Data energi
	↔ RAD.07.03 Data kehutanan
	↔ RAD.07.04 Data kelautan
	↔ RAD.07.05 Data lingkungan hidup
RAD.08 Informasi Budaya dan agama	↔ RAD.08.01 Data agama
	↔ RAD.08.02 Data kebudayaan
RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	↔ RAD.09.01 Data dalam negeri
	↔ RAD.09.02 Data keuangan
	↔ RAD.09.03 Data informasi
	↔ RAD.09.04 Data komunikasi
	↔ RAD.09.05 Data perencanaan pembangunan nasional
	↔ RAD.09.06 Data aparatur negara
	↔ RAD.09.07 Data kesekretariatan negara
RAD.10 Data Pendukung Umum	↔ RAD.10.01 Data Kebijakan Pemerintah
	↔ RAD.10.02 Data Manajemen Kegiatan
	↔ RAD.10.03 Data Kewilayahan
	↔ RAD.10.04 Data Dukung Lainnya

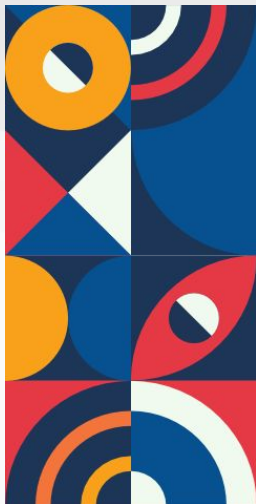


Data dan Relasinya di Domain-Domain SPBE

Penggunaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, akan menghasilkan luaran yang baik berbentuk informasi ataupun kebijakan-kebijakan yang lebih tepat dan akurat.



Data dan informasi yang **diproduksi dan dikelola** oleh sebuah instansi **pemerintah dan pemerintah daerah** merupakan kumpulan hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pelayanan instansi tersebut sebagai pengampu proses bisnis tertentu.



Strategi dan Tindak Lanjut





Penguatan kapasitas dan pemenuhan SDM
pengelola dan analis data di lingkungan Pemerintah Daerah

6

7

8

9

10

11

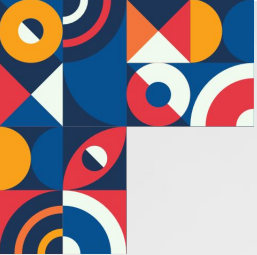
Aktivasi dan koordinasi aktif
melalui Sekretariat SDI tingkat Daerah dan Forum SDI tingkat Daerah

Pengembangan Sistem Informasi/Portal
di Pemerintah Daerah sesuai dengan Kebijakan SDI dan SPBE

Peningkatan kolaborasi dan kerja sama
dengan Penyelenggara Satu Data Indonesia lainnya, baik di tingkat Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah

Pemetaan Program Terhadap Kegiatan Renaksi SDI 2022- 2024
dalam penyelenggaraan SDI di lingkup Pemerintah Daerah

Pembinaan
oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota



Terima Kasih

Salam Satu Data



@data.go.id



@datagoid



www.facebook.com/datagoidofficial